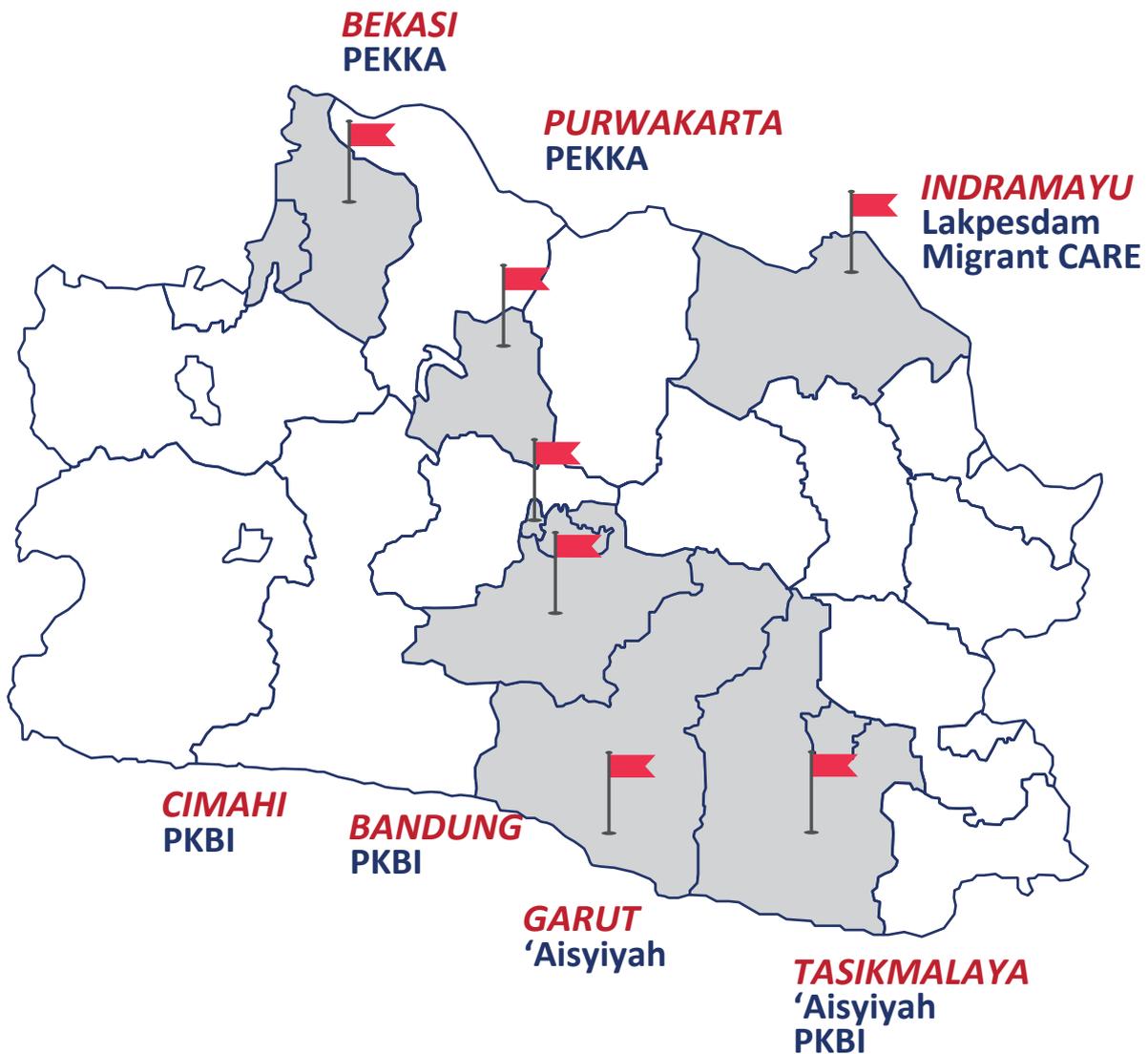


INKLUSI di Jawa Barat

NO-ONE IS LEFT BEHIND



5 Mitra CSO



8 kabupaten/kota



34 desa



Para anggota dari Kelompok Wanita Tani (KWT) menampilkan hasil panen mereka. Para petani perempuan bergabung dengan kelompok KWT 'Aisyiyah untuk meningkatkan akses mereka ke berbagai layanan dan program pertanian. Foto: INKLUSI.

'Aisyiyah adalah sebuah organisasi perempuan Islam di bawah Muhammadiyah yang berfokus untuk membantu perempuan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok marginal. INKLUSI mendukung inisiatif 'Aisyiyah di **6 desa di Kabupaten Garut** dan **6 desa di Kabupaten Tasikmalaya**.

Kelompok perempuan akar rumput 'Aisyiyah, **Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)**, bergerak bersama masyarakat, tokoh agama, sekolah, dan pemerintah untuk mengembangkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan **undang-undang dan strategi nasional** untuk mengatasi **kekerasan seksual, perkawinan anak dan *stunting*, inklusi disabilitas**, serta mendukung **anak muda dan lansia**.

Para relawan BSA melakukan penjangkauan masyarakat untuk mensosialisasikan peraturan dan program pemerintah dan mengadvokasi kesenjangan dalam pelaksanaan layanan. Mereka juga membentuk kelompok ekonomi dan usaha, melatih petani perempuan, dan melibatkan laki-laki dalam program-program pendidikan keluarga.

Di Garut, 'Aisyiyah mengundang pelaku bisnis dan pemerintah untuk duduk bersama dan memberikan pelatihan dan menciptakan peluang kerja bagi penyandang disabilitas di bidang pembuatan roti dan mie maupun manufaktur. Untuk membangun ketahanan ekonomi perempuan, 'Aisyiyah berencana membentuk sekolah kewirausahaan BSA untuk perempuan lansia, dan bekerja erat dengan Bappenas dalam perancangannya.

Inisiatif-inisiatif 'Aisyiyah di Jawa Barat mencakup:



Strategi Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak yang dikembangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi.



Bank Sampah adalah kelompok-kelompok ekonomi yang menghasilkan pendapatan dari daur ulang.



Rencana Aksi Daerah untuk Pelaksanaan SDG (RAD SDG) di Jawa Barat, yang *pilot project*nya sedang dikembangkan bersama-sama dengan Bupati Garut.



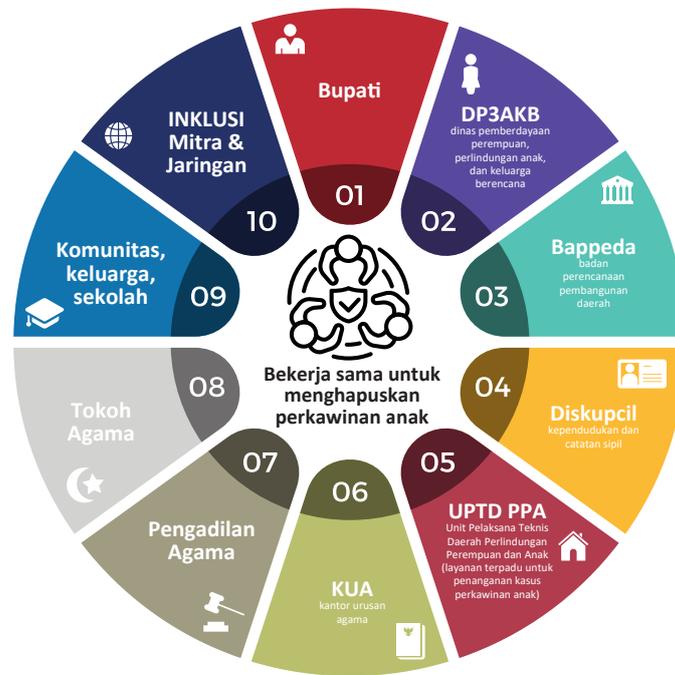
Kelompok Wanita Tani (KWT) meningkatkan akses ke berbagai layanan dan program pertanian, seperti subsidi pupuk, pendanaan modal, dan pelatihan bagi petani perempuan.



Kelompok-kelompok Rumah Gizi meningkatkan akses ke buah dan sayuran segar serta pendidikan tentang gizi dan ASI eksklusif.



Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA) menghasilkan pendapatan melalui pembentukan usaha-usaha kecil.



Lakpesdam PBNU – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lakpesdam di bawah organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) bekerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran yang menjunjung hak asasi manusia dan pemberdayaan manusia.

INKLUSI mendukung kerja mereka dalam hal pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Di Jawa Barat, mitra lokal mereka, **Fatayat dan Lakpesdam Indramayu** bekerja di **4 desa di Kabupaten Indramayu**.

Konsultasi dan pemetaan dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan yang semuanya memiliki peran untuk memberantas perkawinan anak melalui pelaksanaan efektif **Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)** dan **Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** di Jawa Barat.

Kerja-kerja Fatayat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyebab dan tren perkawinan anak di Kabupaten Indramayu, memperkuat pemantauan (*monitoring*) dan pencatatan kasus lokal yang terdaftar maupun tak terdaftar, meningkatkan pelaporan target-target nasional, dan meningkatkan partisipasi perempuan di proses pemerintahan desa hingga kabupaten.

Lakpesdam dan Fatayat Indramayu mempromosikan pencegahan dan penanganan perkawinan anak dengan multi-pemangku kepentingan di lima area kunci:



Mendorong keterlibatan keluarga, guru, dan tokoh agama dalam upaya mencegah perkawinan anak melalui kegiatan pembangunan kesadaran dan kajian keagamaan.



Memperkuat peran layanan dasar, khususnya posyandu remaja, dan layanan bimbingan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA).



Meningkatkan akses korban perkawinan anak ke **layanan perlindungan sosial dan intervensi kekerasan** melalui pencatatan kasus perkawinan anak yang lebih baik oleh pemerintah desa.



Mengadvokasi peraturan desa dan daerah untuk pencegahan perkawinan anak.



Mengembangkan model koordinasi yang berdampak dan berkelanjutan antara desa dan berbagai pemangku kepentingan.

Migrant CARE – Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Migrant CARE mengadvokasi kebijakan dan peraturan internasional dan domestik untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia, mencegah perdagangan orang, dan menjamin akses ke perlindungan sosial.

Migrant CARE bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, termasuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial Kabupaten untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui model **Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) DESBUMI**. DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) memberikan layanan migrasi aman, pemrosesan dokumen, penanganan kasus, layanan konsultasi, bantuan hukum, dan layanan rujukan.

Kelompok-kelompok DESBUMI mendampingi pemerintah desa untuk mengumpulkan data tentang pekerja migran dan menghubungkan mereka ke layanan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta mengadvokasi peraturan desa untuk perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.



Pertemuan bulanan pekerja migran perempuan untuk mendiskusikan kegiatan DESBUMI di Kabupaten Indramayu.
Foto: Migrant CARE

Migrant CARE Indramayu bekerja di **7 desa** di Kabupaten Indramayu. Sebagian inisiatif yang dijalankan mencakup:



Peraturan Desa (Perdes) DESBUMI Indramayu, yang memberikan dasar hukum dan penganggaran dari pemerintah desa kepada layanan DESBUMI dan memfasilitasi perwakilan DESBUMI di dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kabupaten dan kecamatan.



Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) DESBUMI yang didirikan di 3 desa di Indramayu: PPT DESBUMI Juntinyuat, PPT DESBUMI Juntiweden, dan PPT DESBUMI Tinumpuk.



Kelompok usaha perempuan dan koperasi memberikan pendapatan alternatif dan ketahanan ekonomi bagi para mantan pekerja migran perempuan. Produk-produk lokal mereka seperti terasi bawang, akar kelapa, sambal abaca, sambal cumi petai, dan jeruk bubuk siap minum yang dibuat dari buah jeruk lokal dijual melalui media sosial dan *marketplace online*.

PEKKA - Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga



Para lulusan Akademi Kewirausahaan Paradigta PEKKA di Purwakarta memproduksi Teh Sachi untuk usaha baru mereka.
Foto: INKLUSI.

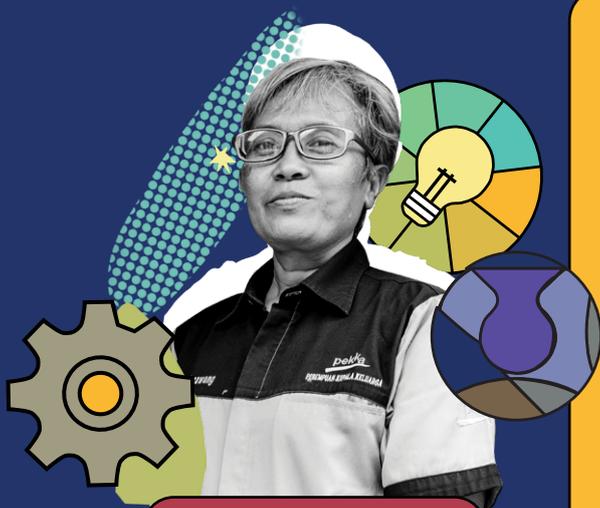
Cabang-cabang lokal PEKKA bekerja untuk meningkatkan akses kepada layanan dan sumber daya ekonomi bagi para perempuan kepala keluarga dan kelompok marginal lainnya. **Serikat Pekka Kabupaten Cianjur-Bekasi** bekerja di **4 desa**, sementara **Serikat Pekka Kabupaten Karawang-Purwakarta** bekerja di **3 desa**.

Para lulusan **Akademi Kewirausahaan Paradigta PEKKA** didukung untuk membentuk usaha PEKKA dan menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat lokal. Para kader dari Akademi Purwakarta mendampingi para lulusan untuk mengakses bahan mentah untuk memproduksi panganan khas lokal yang terkenal, seperti 'teh sachi', 'umpet kacang', dan 'simping'.

Penjualan dan distribusi difasilitasi melalui inisiatif **PEKKA Mart**. PEKKA Mart didirikan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari (sembako) bagi para perempuan marginal dan mempromosikan produk lokal. PEKKA Mart Mawar Merah di Bekasi telah mendukung 55 anggota dari 4 kelompok ekonomi. PEKKA Mart Purwakarta memiliki 22 lulusan dari 3 kelompok ekonomi yang juga bertindak sebagai kader PEKKA Kecamatan Pesawahan. Para kader ini mendampingi para perempuan untuk menjalani prosedur untuk memperoleh SIUP, kode produksi (PIRT), dan tanggal kedaluwarsa untuk produk mereka sesuai peraturan pemerintah.

Melalui kerja mereka dengan para perempuan kepala keluarga, para anggota PEKKA Desa Cidahu Purwakarta mendampingi Bappenas dalam pengumpulan data dan merancang panduan untuk **Program Layanan Lansia Terpadu (LLT)** dan **Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI)**.

Masyarakat sekitar kemudian mengetahui tentang kegiatan-kegiatan tersebut dan manfaat keanggotaan Serikat Pekka melalui inisiatif lain, yaitu **Jurnalisme Warga PEKKA (JWP)**. Di Bekasi, para kader melatih para anggota untuk memproduksi Buletin 'Cermin Pekka Bekasi' untuk menjangkau dan memberdayakan komunitas marginal.



Ibu Astini

Mentor Akademi Paradigta PEKKA Purwakarta.

"Hal yang membuat saya bangga bergabung dengan PEKKA adalah saya dapat memperoleh banyak pengetahuan, berbagi pengalaman, dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga Akademi Paradigta dapat menghasilkan banyak reformis perempuan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat sekitar."

PKBI mengadvokasi pemenuhan hak-hak dasar seperti perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi kelompok marginal, khususnya **perempuan transgender (Waria)** dan **anak-anak yang berhadapan dengan hukum**. Di Jawa Barat, PKBI bekerja di **3 kabupaten (Bandung, Cimahi, dan Tasikmalaya)**.

Dengan bekerja sama dengan **Srikandi Pasundan**, PKBI berusaha mengatasi diskriminasi, kurangnya pemenuhan hak warga, penerimaan sosial melalui Forum Keluarga, mengembangkan mekanisme rujukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan bersama pemerintah daerah dan CSO, serta meningkatkan akses kepada layanan kesehatan dan layanan sosial kemasyarakatan untuk waria melalui pendekatan inklusi sosial.

PKBI juga memberikan dukungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak mereka atas layanan kesehatan, pendidikan, dan hukum. Hal ini dilakukan termasuk dengan mempromosikan lingkungan yang bebas kekerasan dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat. Dengan bekerja sama dengan **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), penyedia layanan masyarakat, dan pemerintah daerah**, PKBI berfokus pada inisiatif-inisiatif kunci sebagai berikut:



Dibentuknya **Forum Keluarga** untuk orang tua agar dapat mengakses informasi tentang anak mereka, memberikan kelas *parenting*, dan mempersiapkan pembebasan anak mereka.



Mendirikan **Forum Anak** dengan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Forum Anak Provinsi dan Kabupaten di Jawa Barat, serta Pemerintah Kota.



Memberikan **pelatihan dan pendidikan keterampilan** melalui pemerintah, universitas, komunitas seni, dan para praktisi profesional.



Memberikan **konseling psikologis**, dan bimbingan untuk **mengelola kesehatan mental** dengan bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas).



Mengembangkan **Panduan penanganan dan reintegrasi** anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dengan bekerja sama dengan **Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat**.

Melalui upaya-upaya ini, PKBI bertujuan memastikan kelompok marginal menerima hak dasar mereka demi terwujudnya lingkungan yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

NO-ONE IS LEFT BEHIND

Tidak Ada Satupun yang Tertinggal

INKLUSI

Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, disingkat INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 - 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, 129 kabupaten, dan 650 desa di Indonesia.

